

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA  
PEKANBARU DALAM MENGATASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana strata satu  
Bidang Ilmu Sosial program studi ilmu pemerintahan  
Pada Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik  
Universitas Islam Riau*



**RINDAH WIDODO**  
**NPM: 167310011**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Rindah Widodo  
NPM : 167310011  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
JudulUP : Evaluasi kebijakan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 23 November 2020

Turut Menyetujui:  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Dr.Ranggi Ade Febrian, M. Si

Pembimbing

Dra. HJ. Monalisa M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Rindah Widodo  
NPM : 167310011  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 1 Februari 2021

Ketua



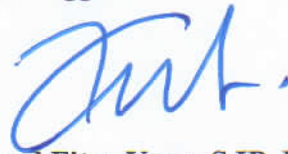
**Dra. Hj. Monalisa, M.Si**

Sekretaris




**Andriyus, S.Sos., M.Si**

Anggota



**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA**

Mengetahui  
Wakil Dekan I,



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


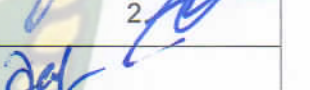

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

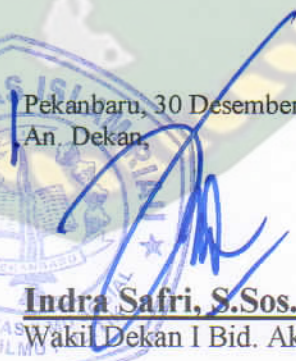
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1421/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 29 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rindah Widodo  
NPM : 167310011  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 77.6 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Anggota	3. 

Pekanbaru, 30 Desember 2020  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 192/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
  2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
  3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
  4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR.
  5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rindah Widodo  
N P M : 167310011  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

**Struktur Tim :**

1. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Andriyus, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Ahmad Fita Yuza, MA Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 29 Desember 2020  
Dekan,



**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Rindah Widodo  
NPM : 167310011  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

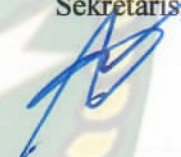
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 1 Februari 2021

An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

  
**Dra. Hj. Monalisa, M.Si**

  
**Andriyus, S.Sos., M.Si**

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Wakil Dekan I

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Ketua,

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul: “Kebijakan Dinas Social dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Gelandangan dan Pengemis Dikota Pekanbaru” tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosisal & politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M. Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Selaku Prodi jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing ke dua yang telah banyak memberikan masukan demi terlaksananya Skripsi ini.
4. Ibu Dra. H. Monalisa, M.Si sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi terlaksananya penelitian ini.

5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satupersatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.  
Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 23 November 2020

Penulis

Rindah widodo



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	15
B. Kerangka Pikir .....	29
C. Konsep Operasional .....	32
D. Operasionalisasi Variabel .....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Informan .....	35

D. Jenis dan Sumber data.....	37
E. Teknik Pengumpulan data.....	38
F. Teknik Analisis data.....	40
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	42
<b>BAB IV DEKSRIPI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	45
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	52
C. Visi dan misi dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru .....	54
D. Struktur organisasi dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru .....	56
E. Tugas pokok dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru .....	57
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Identitas informan.....	64
1. Jenis kelamin masing-masing informan .....	64
2. Tingkat pendidikan masing-masing informan .....	65
3. Tingkat umur masing-masing informan .....	66
B. Analisis hasil pembahasan evaluasi kebijakan dinas sosial Dan pemakaman kota pekanbaru dalam mengatasi Gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru .....	86
C. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam mengatasi gelandangan dan pengemis Dikota	

Pekanbaru .....	89
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

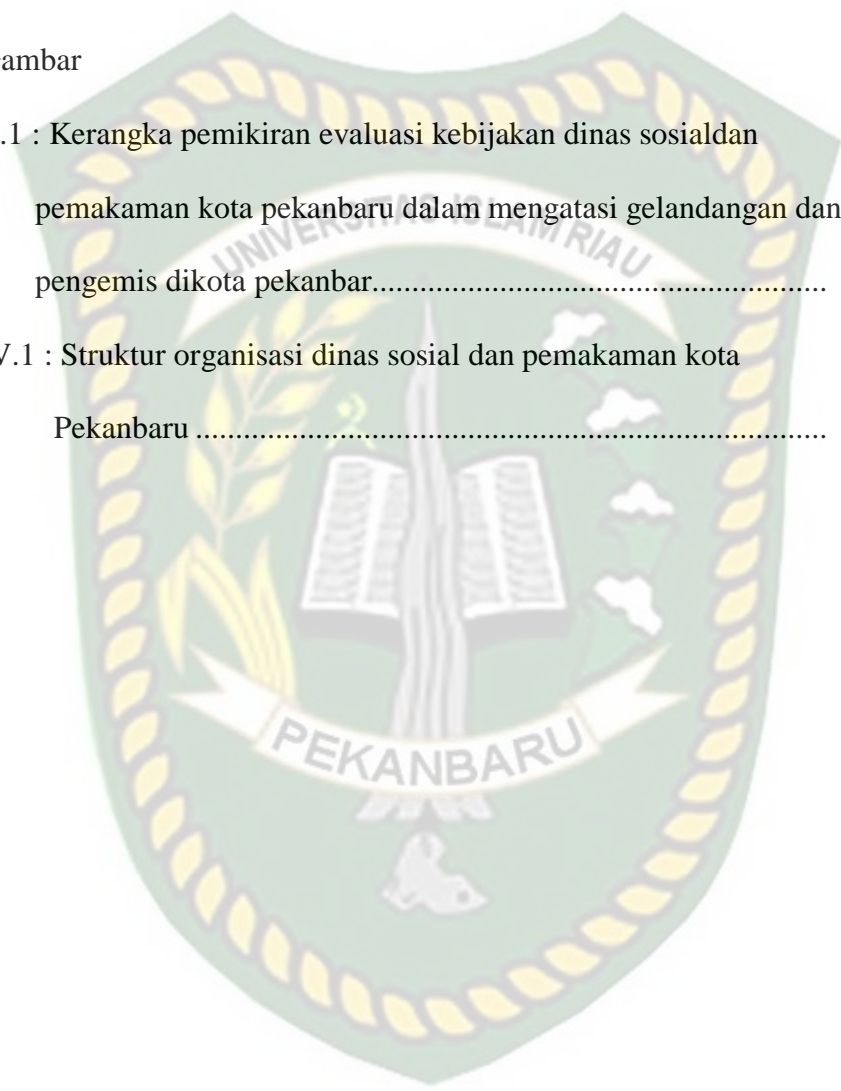


## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah gelandangan dan pengemis kota pekanbaru tahun 2018-2019 .....	9
II.1: Konsep operasional variabel kebijakan dinas sosial kota Pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis .....	32
II.2: Kajian penelitian terdahulu yang penelitiannya Menyangkut tentang gelandangan dan pengemis .....	39
III.1 : Jadwal waktu kegiatan tentang kebijakan dinas sosial kota Pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis .....	42
IV.1 : Jumlah kecamatan dan kelurahan di kota pekanbaru .....	48
V.1 : Jenis kelamin informan .....	65
V.2 : pendidikan informan .....	65
V.3 : Tingkatan umur .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka pemikiran evaluasi kebijakan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru.....	31
IV.1 : Struktur organisasi dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru .....	56



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rindah Widodo  
NPM : 167310011  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Evaluasi kebijakan dinas sosial dan Pemakaman kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah usulan skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekatpadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.

3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengann ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 November 2020

Pelaku Pernyataan



Rindah widodo

## Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Gelandangan Dan Pengemis Dikota Pekanbaru

### ABSTRACT

By:

**Rindah widodo**

**167310011**

*penelitian ini dilatar belakangi masih banyaknya gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru karena kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dinas sosial kota pekanbaru dalam melakukan pelatihan keterampilan berupa keterampilan menjahit, perbengkelan, dan pengkas rambut, tetapi belum sepenuhnya berhasil dan belum terlihat hasilnya. Penelitian ini dilakukan di kota pekanbaru provinsi riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dinas sosial kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru dan mengetahui hanbatan atau kendala yang di alami oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis. Jenis penelitian ini deskriptif yaitu suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan lebih banyak didominasi kata-kata, kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka meski tidak menutup kemungkinan di tampilkan tabel atau grafik untuk mendukung kelengkapan data. metode pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan reduksi data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Dalam menangani gelandangan dan pengemis dinas sosial kota pekanbaru belum sepenuhnya maksimal karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berada di jalan umum 2. Faktor penghambat dalam mengatasi gelandangan dan pengemis adalah mengubah dan menginset pola pikir gelandangan dan pengemis dan butuh waktu yang cukup lama.*

**Kata kunci : evaluasi kebijakan, dinas sosial, gelandangan dan pengemis**



**Evaluation Of Social Service Policies And Cemeteries in Pekanbaru City in  
Dealing With Homeless People And Beggars In Pekanbaru City**

**ABSTRACT**

**By:**

**Rindah Widodo**

**167310011**

The background of this research is that there are still many homeless people and beggars in the city of new week due to insufficient daily needs. Kota baru's social services office in conducting skills training in the form of sewing, workshop and haircut skills, but the results have not been fully successful. This research was conducted in the city of new week, riau province. The purpose of this study is to determine the policies of the social services of the new week city in overcoming the homeless and beggars in the new week city and to find out the obstacles or constraints experienced, by the social services and cemeteries in the new week city in overcoming homeless people and beggars. This type of research is descriptive, namely a study to obtain a qualitative description and will be dominated by words, sentences and descriptions and rarely uses numerical data, although it does not rule out the possibility of displaying tables or graphs to support the completeness of the data. This research data collection method is observation, interview, and documentation, data analysis is done by data reduction and conclusion. The results of this study show 1. In dealing with homeless people and beggars, the social service of pekanbaru city has not been fully maximized because there are still many homeless people and beggars on public roads 2. The inhibiting factor in overcoming homelessness and beggars is changing and inseting the mindset of homeless and beggars and it takes a long time

**Keywords: Evaluation Of policies, social services, vegabond and Beggars**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sesuai dengan amanat pembangunan nasional yang bertujuan pembangunan manusia seutuhnya yakni manusia Indonesia yang berkesejahteraan dan berkeadilan sosial. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk itu pembangunan nasional dan pembangunan daerah harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pembangunan nasional tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi saja melainkan harus memberikan perhatian lebih pada masalah-masalah sosial yang terjadi, terutama pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Untuk itu diperlukan perlindungan sosial dan pemerintah untuk mencegah kaum lemah terpinggirkan.

Masalah kependudukan merupakan salah satu sumber masalah sosial yang penting, karena penambahan penduduk dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, apalagi jika bertambahnya tersebut tidak terkontrol secara efektif. Akibat penambahan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat yang semakin terbatas. Pertambahan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian yang rendah, dan peluang kerja yang sangat kecil sebagai akibat dari perubahan era globalisasi

menuju era pasar bebas yang menuntut setiap individu untuk memperjuangkan hidupnya.

Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan suatu masalah yang tidak bisa di hindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan atau kota-kota besar. Yang menjadi Salah satu factor yang dominan yang mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pasal 3 Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakatn dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan soial.
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah melakukan razia di setiap persimpangan dan beberapa tempat setrategis ternyata tidak bias membuat gelandang dan pengemis ini menjadi jera.keberadaan gepeng di Kota Pekanbaru

semakin menjamur, karena ketidak mampuan dinas social dalam melaksanakan pengawasan dan penangkapan terhadap gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan pembentukan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang di mana dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu, urusan pemerintah absolut, konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pasal 12 undang-undang No 3 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan:

1. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
  - e. Ketentraman, keterlibatan, dan perlindungan masyarakat
  - f. Social

2. Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan penataan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistic
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan

3. Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat

(1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan

- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumberdaya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian dan
- h. transmigrasi

Sepertinya gelandangan dan pengemis tetap menjadi masalah dari tahun ke tahun, baik itu wilayah penerima (perkotaan) maupun di wilayah pengirim (pedesaan) walaupun telah di usahakan penanggulangan gelandangan dan pengemis ini secara terpadu di wilayah penerima dan pengirim suatu saat pasti ada sejumlah gelandangan dan pengemis yang kena penertiban dan akan di kembalikan ke daerahnya masing-masing setelah melalui pembinaan.

Pada umumnya penyebab terjadinya munculnya gepeng dapat di lihat dari factor internal dan eksternal. Factor internal berkaitan dengan kondisi diri sang peminta-minta sedangkan factor eksternal berkaitan dengan kondisi luar yang bersangkutan.

Untuk mengantisipasi menjamurnya pengemis di Kota Pekanbaru maka Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 tentang larangan.menyatakan bahwa gelandangan dan pengemis di larang melakukan aktivitas di depan umum dan di tempat umum, di jalan raya,jalur hijau,persimpangan lampu merah.jika kita perhatikan masih ada gelandangan dan pengemis yang terlihat di tempat umum atau di persimpangan lampu merah.

Selanjutnya sesuai Bab V tentang penertiban dan pembinaan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Social dikatakan tindak lanjut razia di koordinasikan dengan Dinas Social dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti social milik pemerintah daerah dan/atau panti swasta dan/atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini Yang terlibat dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru yaitu Satpol PP sebagai penertibannya, Dinas Social dan Pemakaman sebagai pembinaanya dan untuk Polresta Pekanbaru lebih keteknis lapangannya sebagai Back Up yang membantu dan Satpol PP dan Dinas Social dan Pemakaman jika ada tindakan anarkis atau criminal oleh gelandangan dan pengemis yang ditertibkan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 telah di katakana pada BAB II pasal 2 yaitu :

1. Genlandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tidak tetap dan mengembara di tempat umum.
2. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

3. Gelandangan dan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Berdasarkan peneliti lihat dilapangan bahwa masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang masih mengemis dan menggelandang di tempat umum di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 telah di katakana pada BAB III pasal 3 tentang larangan:

1. Dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, di jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.
2. Dilarang bagi setiap orang yang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan atau di tempat-tempat umum.
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 telah jelas dikatakan pada Bab V tentang penertiban dan pembinaan pasal 8 yaitu:

1. Penertiban gelandangan dan pengemis di laksanakan razia oleh satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerja sama dengan pihak kepolisian.



2. Razia gelandangan dan pengemis di lakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia di tempat-tempat umum di mana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga di perolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
3. Setiap orang yang terjaring dalam razia akan di tangkap dan dip roses secara hokum yang berlaku.
4. Tindakan lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah daerah dan / atau panti swasta dan / atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota pekanbaru.
5. Wali kota atau pejabat yang di tunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis.

Dalam menjalankan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis,. Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum mampu untuk melaksanakannya dengan baik dan berkelanjutan. Sehingga jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru masih tergolong cukup tinggi.

Berikut ini ditampilkan jumlah data gelandangan dan pengemis Kota Pekanbaru dari Tahun 2018-2019 dan untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.1 Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019**

No	Tahun	jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring	Gepeng tempatan	
			Gelandangan	pengemis
1.	2018	7	0	7
2.	2019	100	65	35
Jumlah		107	65	42

*Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Tahun 2019.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan sebagian besar berasal dari Kota Pekanbaru. Melihat banyaknya gelandangan dan pengemis maka Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru harus bisa mengatasi permasalahan ini.

Ada pun Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu:

- a. penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan razia oleh satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontiniu antar lintas instansi dengan melakukan razia di tempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara priodil.
- c. Setiap orang yang terjaring dalam razia akan di tangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.

- d. Tindak lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah daerah dan atau panti swasta dan atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota pekanbau
- e. Walikota atau pejabat dapat memerintahkan menuup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota di Bidang Rehabilitasi Sosial Menurut pasal 14 mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang Rehabilitas Sosial.
- b. Mengkoordinasi, membina, merumuskan, dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- e. Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Salah satu masalah yang di hadapi oleh kota pekan baru adalah masalah pemnyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS). Eleh karena itu pemerintah harus mampu untuk membantu masyarakat yang memiliki masalah kesejahtraan sosial. Karena sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Maka pemerintah harus mampu melayani masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu dan memiliki masalah dengan kesejahtraan penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS), seperti gelandang dan pengemis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republic Indonesi No 22 Tahun 2014 tentang standard rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial. Pada pasal 2 ayat (a) menyatakan bahwa standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi permasalahan gelandangan dan pengemis ini, maka terdapat beberapa Program Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pegawai di lingkungan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru.
2. Meningkatkan kesejahtraan sosial bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS).
3. Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial(PMKS) dengan bekerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

4. Memberikan bantuan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam bentuk : usaha ekonomi produktif (UEP), kelompok usaha bersama (UB) dan korban bencana
5. Memberikan pelayanan dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, korban tindak kekerasan (KTK), gelandangan dan pengemis (Gepeng) serta penyakit sosial lainnya.
6. Mengembangkan atau meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui: karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, organisasi sosial atau LSM dan dunia usaha.

Ada pun berikut susunan Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemukiman

Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian kepegawaian umum dan perlengkapan
  2. Subbagian keuangan
  3. Subbagian penyusunan
- c. Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial terdiri dari:
  1. Seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lansia
  2. Seksi pemberdayaan keluarga miskin
  3. Seksi lembaga dan penyuluhan sosial
- d. Bidang rehabilitasi sosial terdiri dari:

1. Seksi rehabilitasi anak nakal, eks korban hapza dan hukuman
  2. Seksi rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat
  3. Seksi rehabilitasi tuna sosial
- e. Bidang bantuan sosial terdiri dari:
1. Seksi bantuan sosial dan korban bencana
  2. Seksi HAM, pahlawan dan perintis kemerdekaan
  3. Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana
- f. Bidang pemakaman terdiri dari:
1. Seksi registrasi, penyiapan lahan dan perlengkapan
  2. Seksi pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman
  3. Seksi pengawasan dan pengendalian pemakaman

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dibantu oleh unit-unit kerja yang ada dibawahnya. Salah satu unit kerja tersebut adalah Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 255 Ayat 1 Tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang bertugas dalam menegakan perda dan perkad, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Dari masalah yang di paparkan di atas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan masih adanya gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru yang belum di tangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru:

1. masih adanya gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru yang masih berkeliaran di tempat-tempat umum dan persimpangan lampu merah yang masih belum teratasi.
2. kurangnya pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis meski sudah dilaksanakan razia tetap juga tidak ada efek jera terhadap gelandangan dan pemengemis di kota pekanbru.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat **“Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kota Pekan Baru”**

### **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan di atas maka selanjutnya penulis merumuskan masalah yang di hadapi yaitu:

bagaimana Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kota PekanBaru?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. adapun tujuan ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.
2. untuk mengetahui faktor penghambat Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1. Studi Kepustakaan

##### 2.1.1. Konsep Pemerintahan

Menurut syafiie (2003:18) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Di katakana sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan maupun berkaitan dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Ndraha (dalam labolo, 2011:34) menyatakan pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan Negara.

Menurut dharna (2002;32) pemerintah adalah sekelompok orang yang di beri satu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik dangan individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan dengan harmonis.

Menurut yusri munaf (2016;47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintah di pandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah di maknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintah/Negara.



menurut supriyanto (2009;26) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan Negara.

Pemerintahan juga merupakan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan ada yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas umum pokok pemerintah menurut rasyid (1997;13) antara lain sebagai berikut:

1. menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai.
3. peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
5. melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
6. menerapkan kebijakan ekonomi yang menggantungkan masyarakat luas.
7. menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### 2.1.2. Ilmu Pemerintahan

Gaffer (dalam draha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam seluruh masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Selanjutnya soewargono (dalam ndraha 2010;16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal dan eksternal.

Selanjutnya brasz ( dalam syafiie 2009;21) ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Dan ilmu pemerintahan menurut poelje (dalam syafiie, 2009;21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut musanef (dalam syafiie 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinamis, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Sehingga dapat dilihat dari definisi di atas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagai mana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan public sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

### 2.1.3. Kebijakan Public

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris ialah *policy* kata *wisdom* yang berarti kebijakan dan kearifan. Dunn (2003;123) kebijakan public (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang di buat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan public menurut Anderson (dalam Agustino, 2017;17) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang di perhatikan. Dan menurut Dye (dalam Agustino 2017;15) kebijakan public adalah apa yang di pilih oleh pemerintah untuk di kerjakan atau tidak di kerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang di kerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus di kerjakan oleh pemerintah.

Menurut Riant Nugroho (2006;10) kebijakan public adalah kebijakan yang di buat oleh administrator Negara atau administrator public. Jadi kebijakan public adalah segala sesuatu yang di kerjakan atau yang tidak di kerjakan oleh pemerintah. Sehingga dari pengertian di atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan public di harapkan dapat menyelesaikan dan menertibkan masalah yang ada pada masyarakat. Dari konsep-konsep mengenai kebijakan public dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan public ialah peraturan yang di rumuskan, di buat dan di jalankan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu

Negara sehingga dapat mencapai tujuan Negara yang telah di tentukan oleh Negara tersebut.

Menurut laswell, kebijakan adalah sebagai sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan itu tertuang dalam program yang di arahkan kepada pencapaian tujuan nilai dan praktek. (dalam lubis, 2007;19)

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus di jadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai suatu kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (kansil, 2003:190), menurut amara, kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan. (lubis, 2007:7). Sedangkan stoner dalam kansil (2003:190), mendefinisikan kebijakan adalah suatu strategi atau langkah-langkah yang di ambil dan di laksanakan dalam mencapai tujuan atau suatu maksut.

Kebijakan pemerintahan adalah apa yang di putusan oleh pemerintah pusat dengan perhatian utamanya adalah public policy, yaitu apapun yang di pilih oleh pemerintah, dengan demikian membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. (syafie, 2005:145)

Menurut Easton kebijakan pemerintah adalah kewenangan untuk mengalokasi nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh berarti kewenangan mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah, sedangkan kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public bahkan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua

masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah, dalam Lubis (2007:8).

#### **2.1.4. Kebijakan**

Untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat Abidin. (Abidin, 2002;20)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Suharto (2010:7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dunn (2001: 105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan

- b. Penetapan alternatif- alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/ instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan.

Menurut feriedrick dalam dwijowojoto (2008;53) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

#### **2.1.5. Evaluasi**

Didalam melaksanakan kebijakan dalam mengatasi masalah sosial gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru, penulis mengambil beberapa definisi tentang teori evaluasi antara lain:

Menurut Subarsono (2009;199) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

1. Imput (masukan) merupakan masukan suatu objek untuk dikembangkan untuk kebijakan program atau sesuatu yang diproses dalam program, dapat pula dipersepsi sebagai bahan yang dimasukan dari sesuatu untuk peoses.

2. Proses, yaitu kegiatan untuk menunjukkan upaya mengubah input dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program.
3. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan /jasa, dan program.
4. Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat di implementasikannya suatu kebijakan.

Menurut draha (2011;201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya.

Kemudian menurut suharsimi arikunto (2004;1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut di gunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama dalam evaluasi dalam hal ini aalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan di ambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi merupakan penilaian seara menyeluruh dari input, proses, output, dan outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (nurcholis, 2005;67).

Adapun menurut sondang p. Siagian (2002;174) evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya di capai dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang di capai melebihi sasaran yang telah di tentukan atau

sama dengan yang di harapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi menurut Ndaraha (2011;201) adalah proses perbandingan standard dan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi.tiga diantaranya menurut Ndraha (2011;201)

- A. Model before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tim.
- B. Model das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan senyatanya.
- C. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan)

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisa kebijakan menurut dunn (2003;609) fungsi evaluasi yaitu:

1. Pertama dan paling penting, evaluasi member informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat di capai melalui tindakan public.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi ritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai di perjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang di tuju.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan tujuan dan target. Nilai di



perjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.

#### **2.1.6. Implementasi**

Implementasi menurut syaukani dkk (2003;293) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan yang di harapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup 1. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan lanjutan interpretasi dari kebijakan tersebut. 2. Penyiapan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 3. Bagai mana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.

Menurut Edward (dalam subarsono 2005: 90) dalam suatu implementasi kebijakan ada beberapa factor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu:

- a. “komunikasi” dalam hal ini adalah sejauh mana kenijakan yang sudah ada tersosialisasi dengan baik melalui teknik-teknik komunikasi yang efektif yaitu komunikasi secara akurat, kebijakan yang mesti jelas dan konsisten dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan.
- b. “sumber daya manusia” dalam hal ini sejauh mana tersedianya sumber-sumber yang mencukupi dalam melaksanakan kebijakan seperti sumber

daya manusia yang bertanggung jawab, kebijakan yang dibuat secara relevan dan efektif, fasilitas, peralatan / bangunan yang memadai.

- c. “sikap / disposisi” dalam hal ini apakah pelaksana maupun pihak yang terkait dengan keputusan menunjukkan sikap yang positif terhadap keputusan / kebijakan dan tahu apa yang akan dikerjakan, dan mempunyai kapasitas yang dibuat di antaranya berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan kebijakan dan tidak melakukan diskriminatif terhadap masyarakat.
- d. “struktur birokrasi” dalam hal ini menyangkut dengan kemampuan struktur untuk mengfungsikan kebijakan yang sudah di buat dan mengisyaratkan kerja sama banyak orang dan apakah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai normative yang terkandung didalam kebijakan.

### 2.1.7 Masalah Sosial

Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Jensen, dalam jurnal doddy).

Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkutan paut dengan hubungan antara manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan normative dan dinamakan masalah karena bersangkutan dengan gejala-gejala yang mengganggu kelanggengan dalam masyarakat. Dengan demikian masalah-masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang menyangkut segi moral. Dikatakan masalah karena tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Masalah sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial

yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan.

Oleh sebab itu, jika ditinjau secara teoritik, ada banyak faktor penyebab terhadap tumbuh dan/atau berkembangnya suatu masalah sosial. Secara umum, faktor penyebab itu meliputi :

- a. Structural, yaitu pola-pola hubungan antar individu dalam kehidupan komunitas.
- b. Faktor cultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan/atau berkembang dalam kehidupan komunitas.

Adanya perubahan atas kedua faktor itulah, yang selama ini di teorikan sebagai faktor penyebab utama munculnya suatu masalah sosial. Menurut Robert k. Merton (dalam jurnal dody)

### **2.1.8 Gelandangan Dan Pengemis**

#### **a. Pengertian Gelandangan Dan Pengemis**

istilah “gepeng” merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis. Menurut Departemen Sosial RI (1992) gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup membara di tempat umum. “pengemis” adalah orang-orang yang dapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

Ali, dkk dalam iqbali (2005) menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu membara, atau berkelana (lelana), ia juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran didalam kota, makan minum serta tidur di sembarangan tempat.

Menurut muthalib dan sudjarwo dalam ali, dkk, (1990) di berikan tiga gambaran umum gelandangan yaitu sekelompok orang miskin atau di miskinikan oleh masyarakatnya, orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai dan orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaan dan arah tujuan kegiatannya. Semakin banyaknya gelandangan merupakan cerminan pada saat ini bahwa kemiskinan adalah faktor utama yang paling berpengaruh terhadap masalah sosial ini dan masalah sosial seperti ini banyak yang kita jumpai di perkotaan. Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut mereka berjuang mempertahankan hidup dengan berbagai macam strategi seperti menjadi pemulung, pencopet, pencuri, pengamen dan pengasong. Perjuangan hidup mereka mengandung resiko yang cukup besar, tidak hanya tekanan dari segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial budaya, kerasnya kehidupan jalanan dan tekanan dari aparaturnya maupun petugas ketertiban kota (muryani 2008).

Ditasman (2011) menyebutkan bahwa gepeng yang merupakan singkatan dari gelandangan dan pengemis merupakan seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Pengertian ini terkait dengan masyarakat miskin dari kalangan pendatang, hal ini dikarenakan masyarakat pendatang lebih cenderung tidak langsung dapat beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu hal ini menyebabkan masyarakat pendatang lebih memilih pekerjaan menjadi gepeng. Dari data yang di peroleh dari dinas sosial kota pekanbaru dimana gepeng berasal dari daerah Sumatra utara, Sumatra barat, aceh, Palembang dan jambi.

Hal ini di dasarkan pada daerah pemulangan bagi gepeng yang terjaring razia. Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis. Gelandangan muncul di akibatkan oleh tekanan ekonomi yang semakin sulit. Masalah ekonomi muncul dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda di antara yang satu dengan daerah yang lain.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Robby kurniawan junaidy, Volume 1 No 2, 2014	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekan Baru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008)	Peranturan daerah kota pekanbaru no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial masih belum bisa terlaksana secara optimal karena criteria efektivitas dari evaluasi kebijakan ketertiban sosial di kota pekanbaru tidak tercapai	Menggunakan teori evaluasi dalam hubungannya dengan mental sejauh mana keaktifan suatu kebijakan evaluasi di sini untuk menilai pelaksanaan perda kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial penataan pembinaan gelandangan dan pengemis
Dia meirina sari, Volume 3 No 1, 2017	Analisis factor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru	Menemukan bahwa factor yang mempengaruhinya ialah kebijakan itu sendiri, factor lembaga atau instansi terkait dan factor lingkungan	Menggunakan teori implementasi kebijakan dalam hubungannya dengan penerapan penertiban dan pembinaan gepeng di kota pekanbaru.
Adhe akbar alfiantara, Volume 4 No 2, 2017	Evaluasi Program Pemberdayaan Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) Pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015	Pemberdayaan eks tuna sosial yang di lakukan oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru melalui tiga usaha yaitu: usaha preventif (dalam bentuk pencegahan), usaha represif	Menggunakan teori pembinaan dalam hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap pembinaan gelandangan dan pengemis

Nama	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
		(dalam bentuk penertiban) dan usaha rehabilitasi (dalam bentuk pembinaan)	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### 2.3. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikiran menjelaskan hubungan antara variabel dan indikator penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:

**Gambar:I.1 Kerangka Pikiran penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Social Dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis.**



Sumber: modifikasi penulis tahun 2019



#### 2.4. konsep operasional

Alat ukur yang di gunakan pada umumnya dalam penulisan penelitian adalah variabel sebagai symbol atau lambang di mana variabel tersebut dapat di tempatkan pada nilai-nilai yang menggambarkan objek penelitian sebagai berikut:

1. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang di rencanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepan.
2. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus di jadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai suatu kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
3. dinas sosial dan pemakaman adalah unsur dari pelaksanaan otonomi daerah, yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah bidang sosial dan pemakaman berdasarkan tugas pembantuan.
4. pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republic Indonesia.
5. gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

6. pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
7. Input (masukan) merupakan masukan suatu objek untuk dikembangkan Proses untuk kebijakan program atau sesuatu yang diproses dalam program, dapat pula dipersepsi sebagai bahan yang dimasukkan dari sesuatu untuk proses.
8. proses, yaitu kegiatan untuk menunjukkan upaya mengubah input dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program.
9. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan /jasa, dan program.
10. Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat di implementasikannya suatu kebijakan.

## 2.5.Operasional Variabel

Variabel yang akan di analisis dalam penelitian di operasionalkan sebagai berikut:

Konsep	variabel	Indikator	Item Penilaian
Menurut subarsono (2009;199) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.	Ealuasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru	1. Input (masukan)  2. Proses (proses)  3. Output (keluaran)  4. Outcome (manfaat)	a. Peraturan yang digunakan didalam pelaksanaan kebijakan. b. Sumber daya dukungan (anggaran, fasilitas, sumberdaya manusia.)  a. Implementasi pelaksanaan program. b. Adanya keterlibatan kelompok masyarakat.  a. Efektifitas terlaksananya program. b. Efisiensi dari hasil pelaksanaan program.  a. pelaksanaan suatu program terhadap gelandangan dan pengemis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2016;15) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang beralamat di jl. Parit indah/jalan datuk setia maharaja No.6 Pekanbaru. Adapun alasan penulis dalam memilih lokasi tersebut dikarenakan Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang salah satu kota besar dan terindikasi belum terlaksananya dengan baik dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru karna jika di lihat masih adanya gelandangan dan pengemis yang beraktifitas di Kota Pekanbaru.

### **3.3 Informan**

Informan penelitian adalah sumber informasi yang di peroleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Menurut Bagong Suyanto (2005;172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang di teliti

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling technique yaitu cara penentuan informasi yang di tetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah kepala dinas sosial kota pekanbaru.

Adapun informan terdiri dari:

1. Sekretaris : 1 orang
2. Bidang rehabilitasi sosial : 1 orang
3. Satpol PP : 1 orang
4. Gelandangan dan pengemis : 5 orang

Dalam penelitian ini mereka dijadikan sebagai *key informan*. Alasan peneliti mengambil mereka sebagai informan karena mereka merupakan stakeholder (pemangku kepentingan) yang berperan dan terlihat terhadap pembinaan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk

penarikan sampel informasi dan key informasi pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling.

### 3.4 Jenis Sumber Data

data yang digunakan dalam penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016;56) data primer adalah data yang di peroleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang di peroleh dari hasil wawancara langsung kepada informan penelitian. Dari hasil wawancara tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan fenomena untuk di tarik menjadi kesimpulan.

#### b. Data skunder

Menurut Sugiyono (2016;56) data sekunder adalah data yang tidak langsung dengan mencari data dengan melalui dokumen. Data ini di peroleh dengan menggunakan studi literatur yang di lakukan terhadap banyak buku dan di peroleh berdasarkan catatan-catatan, laporan dan gambaran objek penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder adalah data pendukung atau data yang di peroleh dari pihak dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru, berupa dokumentasi, laporan, struktur organisasi tugas dan fungsi, standar operasional prosedur, dan pendukung lainnya.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

adapun teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. wawancara(interview)

wawancara yang di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. sutrisno hadi (dalam sugiyono, 2018;138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu di pegang oleh penelti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.

Dapat interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar di proleh melalui wawancara untuk itu, penguasaan dan pemahaman teknik wawancara sangat mutlak di lakukan. Wawancara bukan hanya di pahami sebagai pembicaraan antara dua pihak yang salah satu pihak bertugas mengajukan

pertanyaan sementara pihak yang lain memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan.

b. Obsevasi

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

Haris Herdiansyah (2014: 131) observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Inti dari observasi yaitu adanya perilaku yang tampak dari adanya tujuan yang ingin dicapai, perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

c. Dokumentasi

Sedangkan Haris Herdiansyah (2014:143) Menyatakan studi dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang



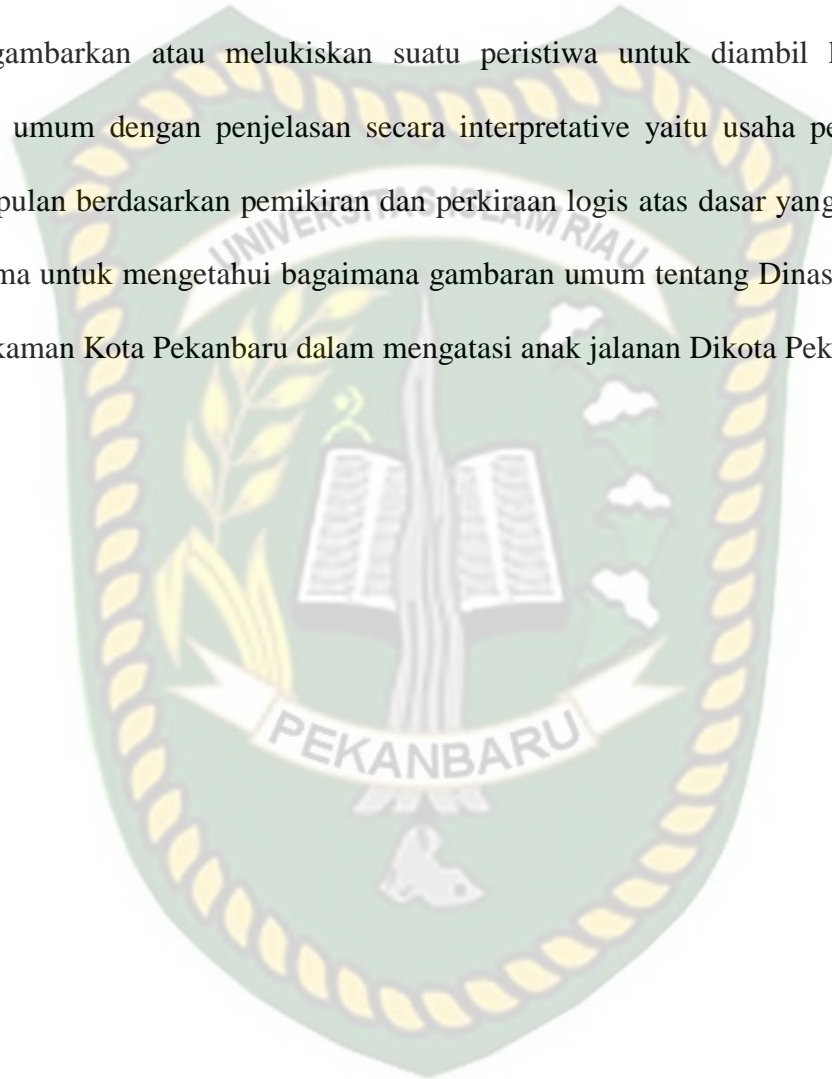
subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita lihat bahwa dokumentasi merupakan instrument penelitian, Dimana instrument penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang berhubungan penelitian. Dengan demikian dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian adalah pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Analisis data merupakan aktivitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil penelitian, data-data yang didapat dikumpulkan dan di klasifikasi menurut jenisnya lalu peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan cara ini diharapkan pengkajian masalah dapat berlangsung serta terperinci dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan sistematis.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data di analisa secara kualitatif, yaitu suatu penilaian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretative yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi anak jalanan Dikota Pekanbaru.



### 3.7. Jadwal Waktu Kegiatan

Penelitian ini dimulai dari bulan juli 2019 direncanakan memakan waktu kurang lebih lima bulan dan akan selesai pada Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1: **Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Anak Jalanan di Kota Pekanbaru.**

No	jenis kegiatan	tahun 2019-2020											
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
1	Persiapan dan penyusunan Up	■											
2	seminar up		■										
3	Riset			■									
4	Penelitian Lapangan				■								
5	Pengelolaan dan analisi Data					■							
6	konsultasi dan Bimbingan Skripsi								■				
7	ujian skripsi									■			
8	revisi dan pengesahan Skripsi										■		
9	penyerahan Skripsi											■	

### 3.8. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dari berbagai literature yang berkaitan dengan judul usulan penelitian.

Bab ini juga terdiri dari kerangka piker, rumusan hipotesis, konsep operasional, operasional variabel dan teknik pengukuran.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian, sistematika laporan penelitian.

**BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan uraian tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba memberi sarana-sarana sebagai sumbangan dari pemecahan masalah yang dihadapi.

## BAB IV

### DESKRISI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 4.1.1 sejarah singkat

Dahulunya nama pekanbaru dikenal dengan nama “senapelan” yang pada saat itu di pimpin oleh seorang kepala suku disebut batin. Pada dasarnya suatu daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemungkiman baru yang kemudian disebut dusun payung sekaki yang terletak di tepi muara sungai siak. Nama payung sekaki tidak begitu di kenal pada masanya melainkan senapelan. Perkembangan senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan siak sri indrapura. Semenjak sultan abdul jalil alamudin syah menetap di senapelan, beliau membangun istananya dikampung bukit berdekatan dengan perkampungan senapelan.

Pada tanggal 9 april tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara kerajaan johor dengan belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut belanda diberi hak yang luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu belanda juga mendirikan loji di petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal belanda tidak dapat masuk ke petapahan, maka senapelan menjadi tempat penelitian kapal-kapal belanda, selanjutnya pelayaran ke

petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, payung sekaki atau senapelan menjadi tempat penupukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk di angkut di pedalaman, maupun dari pedalaman untuk di bawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, payung sekaki atau senapelan memegang peranan penting dalam lalulintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi sungai siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman tapung maupun pedalaman minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute teratak buluh (sungai kelulut), tangkerang hingga ke senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan senapelan sangat erat dengan kerajaan siak sri indra pura. Semenjak sultan abdul jalil alamudin syah menetap di senapelan, beliau membangun istana dikampung bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar lokasi mesjit raya sekrang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya raja muda Muhammad ali yang bergelar sultan Muhammad ali abdul jalil muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar pelabuhan pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang di buat oleh imam suhil siak, senapelan yang kemudian lebih populer disebut pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 rajab hari selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 juni 1784 M oleh sultan Muhammad ali abdul jalil muazamsyah dibawah pemerintah sultan yahya yang kemudian di tetapkan sebagai hari jadi kota pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh sultan Muhammad ali abdul jalil muazamsyah, penguasaan senapelan diserahkan kepada datuk Bandar yang dibantu oleh empat datuk besar yaitu datuk lima puluh, datuk tanah datar, datuk pesisir dan datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi datuk Bandar. Keempat datuk tersebut bertanggung jawab kepada sultan siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya di tangan datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan dikota pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK kerajaan barshuit van Inlandsch zelfbestuur van siak No. 1 tanggal 19 oktober 1919, pekanbaru bagian dari kerajaan siak yang di sebut district.
2. Tahun 1932 pekanbaru masuk wilayah kampar kiri di pimpin oleh seorang kontroleor berkedudukan di pekanbaru.
3. Tanggal 8 maret 1942 pekanbaru dipimpin oleh seorang gubernur militer Go Kung, distrik menjadi GUM yang di kepalai GUNCO.
4. Ketetapan gubernur sumatra di medan tanggal 17 mei 1946 No. 103, pekanbaru dijadikan daerah otonom yang di sebut haminte atau kota B.



#### 4.1.2 Pemerintahan

Secara administrasi kota pekanbaru dipimpin oleh walikota dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Keberadaan kota pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah kota pekanbaru No 3 tahun 2003, kota pekanbaru dibagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 58 kelurahan, untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.1 jumlah kecamatan dan kelurahan dikota pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan
1	2	3
1	Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat Tuah karya Delima
2	Payung sekaki	Labuh baru timur Tampan Air hitam Labuh baru barat
3	Bukit raya	Simpang tiga Tangkerang selatan Tangkerang utara Tangkerang labuai
4	Marpoyan damai	Tangkerang tengah Tangkerang barat Sidomulyo timur Wonorejo
5	Tenayan raya	Kulim Tangkerang timur Rejosari Sail
6	Lima puloh	Rintis Sekip Tanjung ryu Pesisir

1	2	3
7	Sail	Cinta raja Suka maju Suka mulia
8	Pekanbaru kota	Simpang empat Sumahilang Tanah datar Koto baru Sukaramai Koto tinggi
9	Suka jadi	Jadirejo Kampung tengah Kampung melayu Kedung sari Harjosari Sukajadi Pulau karam
10	Senapelan	Padang bulan Padang terubuk Sago Kampung dalam Kampung bandar Kampung baru
11	Rumbai	Umban sari Rumbai bukit Muara fajar Palas Sri meranti
12	Rumbai pesisir	Meranti pandak Limbungan Lembah sari Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : pekanbaru dalam angka tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kota pekanbaru yang berjumlah 12 keamatan dengan jumlah desa atau kelurahan, dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat pada kecamatan sukajadi yakni 7 desa/kelurahan dan yang sedikit adalah kecamatan sail dengan jumlah 3 desa/kelurahan.

#### **4.1.3 Wilayah Geografis**

##### **a. Letak dan Luas**

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 50 meter. Pemungkiman wilayah bagian Utara Landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 samapai dengan 11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $+62,96 \text{ Km}^2$  menjadi  $+444,50 \text{ Km}^2$  terdiri dari 6 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran atau pematokan di Lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetpkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632.26 \text{ Km}^2$ .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang ada dan pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan penduduk terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah Kecamatan baru dengan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

**b. Batas Wilayah**

Secara umum Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

**c. Sungai**

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Tampan, dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke Kota serta dari Daerah lainnya.

**d. Iklim**

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar anatar 34°C-36°C dan suhu minimum antara 20,2°C-23,0°C. curah hujan antara 38,6°C- 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar anatar pertama musim hujan jatuh pada bulan januari s/d September s/d desember. Kedua musim kemarau jatuh pada bulan mei s/d agustus. Dengan kelembapan maksimum anatar 96%-100%, kelembapan minimum 46%-63%.

## 4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

### 4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka sepenuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepaskan begitu saja jajahannya meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Dengan ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda, dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya ingin menguasai Indonesia. Pejuang Indonesia sedikitpun tidak bergeming dengan gertakan Belanda, maka kembali mengertak Belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Ketika menjadi pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroik, dimana pejuang Indonesia telah rela mati demi mempertahankan Republik Indonesia yang telah memproklamirkannya, sementara penjajah Belanda yang selama ini telah mendapat keuntungan dan kenyataan yang melimpah dari bumi Indonesia rela melepaskan begitu saja, maka terjadilah pertempuran yang luarbiasa dasyat, peristiwa ini terjadi antara tahun 1947-1950. Didalam pertempuran besar ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Selain itu untuk menyokong gerakan pejuang yang berada di garis depan di perlukan bantuan yang continue yang mensupply logistic pertempuran dan pemukiman jangan sampai terputus. Dampak peristiwa ini menimbulkan perasaan berhubungan dengan emosional dan juga dari persaudaraan yang kental antara pejuang, relawan dan orang-orang yang terlibat pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut

sebagai hari kesetiakawanan sosial yang jatuh pada 22 desember 1947 yang cikal bakal lahirnya departemen sosial. Hingga kini pemerintah Negara republic Indonesia setiap tanggal 22 desember diperingati hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSAN) atau hari departemen sosial.

Pada tahun 1948 pemerintahan republic Indonesia yang berdiri dan sedang dilanda perang merasa perlunya suatu instansi yang sah dikelola oleh pemerintahan dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun ini dibentuklah yang namanya inspeksi sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 jawatan sosial yang tugas sosialnya adalah membantu para penyandang cacat, tenaga kerja Indonesia dan organisasi sosial.

Pada tahun 1974 jawatan sosial diganti nama menjadi departemen sosial republic Indonesia untuk tingkat pusat dikepalai oleh seorang menteri republic Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut kepala departemen, sementara untuk tingkat provinsi disebut kantor wilayah departemen sosial provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/ kota, untuk tingkat kecamatan disebut petugas sosial kecamatan disebut petugas sosial kecamatan yang berkantor camat setempat. Tugas utama departemen sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan, penyandang cacat, karang tuna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak,

gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersial (PSK), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, departemen sosial pernah dibubarkan oleh presiden republic Indonesia yang pada saat itu di jabat oleh KH. Abdulrahman wahid atau gusdur dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali departemen sosial dengan berganti badan kesejahtraan sosial nasional (BKSN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 kembali dengan nama departemen sosial dan kesehatan republic Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 departemen sosial republic Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada tahun ini juga kota pekanbaru sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja dinas, maka terbentuknya dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru, berdasarkan peraturan pemerintah kota Nomor 07 tahun 2001.

Pada tahun 2008 pemerintahan kota pekanbaru mengeluarkan peraturan daerah No.08 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja yang baru untuk dinas sosial kota pekanbaru.

#### **4.2.2 Visi Dan Misi**

##### **a. visi**

Visi adalah cara pandangan jauh ke depan kemana sebuah instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi tersebut. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan

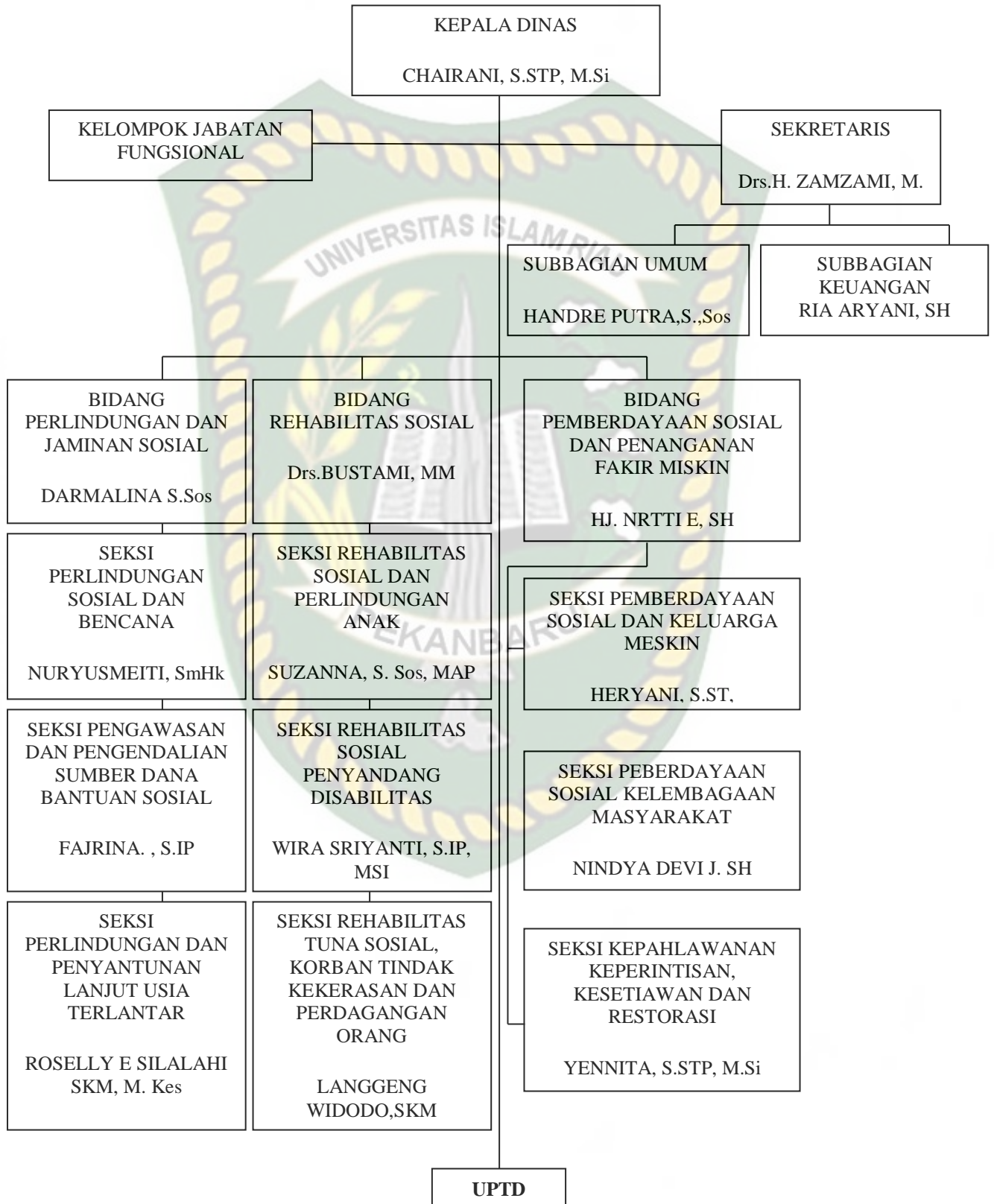
cita-cita dan citra yang ingin di wujudkan. Dengan ditetapkannya visi yang kuat maka suatu instansi akan menjadi lembaga yang mampu mengatur irama kegiatan operasional, mengatur pengelolaan sumber daya, mampu mengembangkan indicator kerja dan carapengukuran.

**b. misi**

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. mengembangkan sistem jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan
- c. pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan seara mandiri.
- d. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. meningkatkan sumberdaya penyelenggara kesejahteraan sosial.
- f. meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 1.1 Struktur organisasi dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru



#### 4.2.3 Tugas Poko Dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

1. dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru terdiri dari

- a. kepala dinas
- b. sekretaris
- c. bidang perlindungan dan jaminan sosial
- d. bidang rehabilitas sosial
- e. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- f. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD).

a. tugas pokok dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru

berdasarkan peraturan wali kota pekanbaru No. 08 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan tugas dan pokok dinas-dinas dilingkungan pemerintahan kota pekanbaru. Dinas sosial kota pekanbaru mempunyai pokok “ melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dibidang sosial”

b. uraian tugas bagian dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru

1. kepala dinas mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial

- b. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial
- c. membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman
- d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
- e. membina unit plaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya
- f. menyelenggarakan urusan piñata usahaan dinas
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. sekretaris mempunyai rinian tugas:

- a. penyusunan program kinerja dinas
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi, keuangan,kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga
- c. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas
- d. pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan
- e. pengkoordinasian laporan tahunan
- f. pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor
- g. pelaksanaan tugas lainnya

3. sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan mempunyai rincian tugas:

- a. perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan

- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
  - c. pengevaluasian tugas administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
  - d. laporan pelaksana tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain.
4. sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas:
- a. perenanaan program kerja sub bagian keuangan dinas
  - b. pelaksanaan verifikasi
  - c. penyiapan surat perintah membayar
  - d. pelaksanaan akuntansi dinas
  - e. pembagian tugas kepada bawahan
  - f. pemberian petunjuk pada bawahan
  - g. pemeriksaan pekerjaan bawahan
  - h. pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
  - i. pengevaluasian tugas
  - j. pelaporan pelaksanaan tugas
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan
5. sub bagian penyusunan program mempunyai rinian tugas:
- a. penyusunan program kerja
  - b. pengumpulan data dan informasi
  - c. pengendalian dan pelaporan
  - d. pengumpulan petunjuk teknis

- e. perumusan rencana kerja
  - f. penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan
6. bidang perlindungan dan jaminan sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial dan advokasi sosial.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan kerusuhan masa.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian dan pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial.
4. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan kegiatan perlindungan dan penyantunan lanjut usia terlantar.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas.
6. Mengkoordinasikan dan membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepala bawahan.
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang.

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari:

- a. Seksi perlindungan sosial korban bencana;
- b. Seksi pengawasan dan pengendalian sumber dana bantuan sosial;
- c. Seksi perlindungan dan penyantunan lanjut usia terlantar.

7. bidang rehabilitas sosial mempunyai rincian tugas:

1. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat anak terlantar/ anak lanjut, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila.
2. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya.
3. mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
4. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
5. mengkoordinasikan menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang rehabilitas sosial terdiri dari:

- a. Seksi rehabilitas sosial dan perlindungan anak
- b. Seksi rehabilitas sosial penyandang disabilitas.

- c. Seksi rehabilitas sosial korban tindak kekerasan dan perdagangan orang

8. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

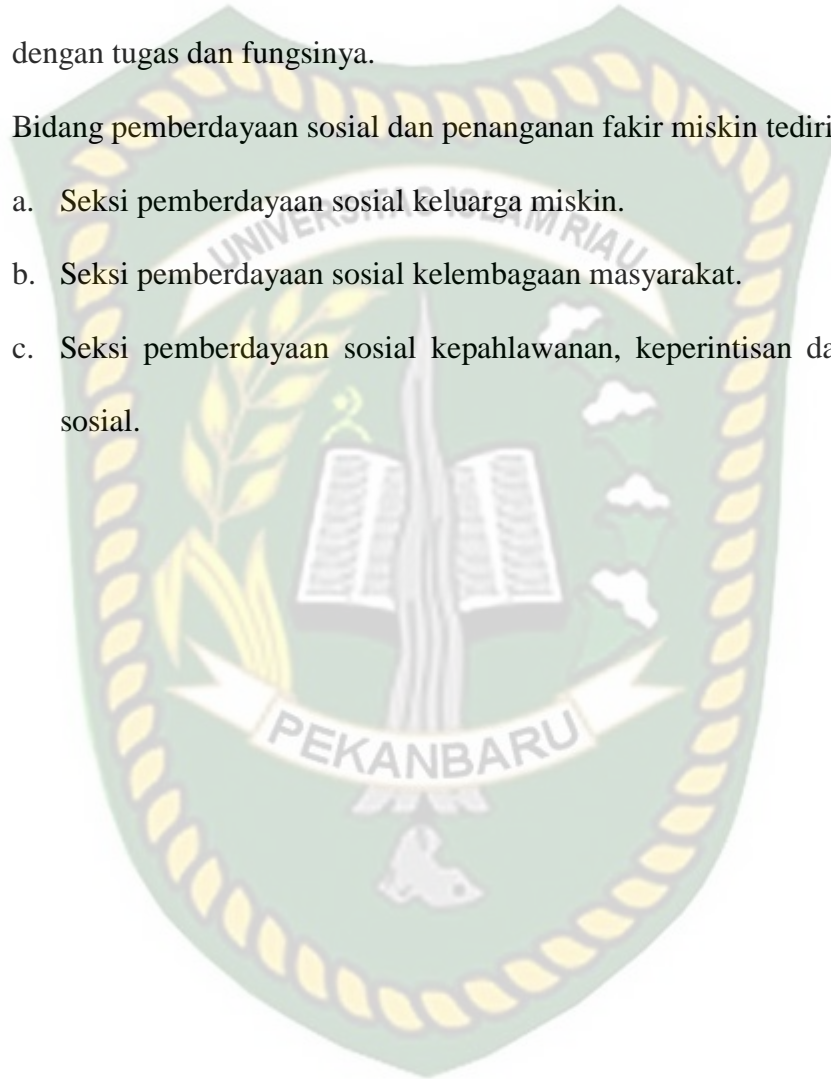
Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-lembaga sosial, dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyebar luasan nilai-nilai kepahlawanan, dan restorasi sosial.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
- d. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PMKS) dibidang tugasnya.
- e. Mengkoordinasi, membina merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
- f. Mengkoordinasikan, membina merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.

- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin terdiri dari:

- a. Seksi pemberdayaan sosial keluarga miskin.
- b. Seksi pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat.
- c. Seksi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial.





## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas informan

Identitas informan merupakan keterangan yang di peroleh dari informan secara langsung berupa wawancara yang dilakukan oleh penelitian. Oleh karena itu maka pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembaca merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian tentang evaluasi kebijakan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru ini peneliti akan menjelaskan mengenai identitas informan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan di bawah ini:

##### 5.1.1 jenis kelamin informan

jenis kelamin responden pada penelitian evaluasi kebijakan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru, pada berikut tabel ini:

Tabel V.1 Jenis Kelamin Informan

No	jenis kelamin	Frekuensi	Presentase(%)
1	laki-laki	5	56%
2	Perempuan	4	44%
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel V.I diatas diketahui bahwa dari 9 responden sebanyak 5 orang atau 56% adalah responden laki-laki, dan 4 orang atau 44% adalah responden perempuan.

### 5.1.2 Tingkat Pendidikan

Tabel V.2 Pendidikan Informan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	SD-SMP	5	56%
2	Sarjana(S1)	2	22%
3	Magister(S2)	2	22%
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Berdasarkan Dari data diatas dapat dilihat dimana informan dinas social dan pemukiman kota pekanbaru yang magister sebanyak 2 orang di bandingkan dengan informan yang berpendidikan S1 sebanyak 2 orang. Sedangkan informan yang tamatan SD-SMP sebanyak 5 orang.

### 5.1.3 Tingkatan Umur

Tabel V.3 tingkatan umur

No	Umur informan	Jumlah	Persentase(%)
1	30-50	7	78%
2	50	2	22%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Di lihat Berdasarkan tabel V.3 diatas diketahui bahwa 7 orang responden adalah berumur 30-50 tahun,50 tahun ada 2 responden.

### 5.2 Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Gelandangan dan pengemis adalah sebagai salah satu bentuk komunitas tersendiri yang lazim tumbuh subur dan berkembang diwilayah perkotaan, baik itu kota-kota besar maupun metropolitan. Dengan Demikian juga yang terjadi di kota pekanbaru yang tingkat perekonomian yang cukup tinggi, pertumbuhan penduduk, pusat pemerintahan provinsi riau dan ibu kota provinsi riau. Timbulnya masalah sosial yang terjadi dan biasa dialami oleh kota-kota besar salah satunya gelandangan dan pengemis, yang sering terlihat diberbagai sudut kota pekanbaru, mulai dari perempatan lampu merah, tempat pembelanjaan, tempat umum lainnya dengan berbagai provesi.

Dinas sosial kota pekanbaru berkewajiban untuk melaksanakan fungsi dibidang kesejahteraan sosial dalam membantu wali kota yang dipimpin oleh kepala dinas dan beberapa bidang yang membantu kepala dinas dalam

melaksanakan tugas dinas sosial. salah satunya satpol PP yang ikut membantu dalam penertiban gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru.sedangkan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru adalah sebagai pembinanya.

Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan sosial yang sampai sekarang ini belum dapat di atasi oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru, hal ini dapat dilihat masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran atau terlihat di sudut kota pekanbaru. Padahal dinas sosial dan pemakaman telah melaksanakan program kebijakan untuk mengatasi gelandangan dan pengemis, akan tetapi sampai sekarang ini dinas sosial belum mampu secara keseluruhan mengatasi gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru.

Oleh sebab itu, perlunya evaluasi untuk melihat pelaksanaan dari kebijakan dinas sosial dan pemakaman dalam menangani masalah sosial salah satunya gelandangan dan pengemis. Indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh subarsono, indikator yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

### **5.2.1 Imput**

Imput merupakan masukan suatu objek untuk di kembangkan dalam suatu kebijakan (program) sesuatu yang diproses dalam program dan dapat di jadikan sebagai bahan yang dimasukan didalam susatu proses.

Imput merupakan rincian penilaian didalam penulisan terhadap evaluasi kebijakan dinas sosial kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan

pengemis. Dengan melihat apa saja yang menjadi masukan dari dinas sosial kota pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh pemerintah daerah kota pekanbaru sebagai asa otonomi dan tugas pembantuan, karena kedudukan dinas sosial kota pekanbaru adalah sebagai instansi atau organisasi publik yang melaksanakan suatu tugas pemerintahan di bidang sosial dan hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam tahapan input ini pada penelitian yang akan menjadi sub indikator penilaian pada kebijakan dinas sosial dalam mengatasi gelandangan dan pengemis akan di ajukan ada dua penilaian yaitu peraturan yang digunakan di dalam pelaksanaan kebijakan dan sumber daya dukungan.

#### **a. Peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan**

Di dalam pelaksanaan untuk mengatasi masalah sosial yaitu masalah gelandangan dan pengemis, dinas sosial yang menjadi mengacu terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang dimana dalam perda tersebut terdapat penjelasan pada bab 1 pasal 1 ayat 20 yang berbunyi bimbingan sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan,meningkatkan kemauan dan kemampuan sasaran bimbingan keterampilan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normatif dan ayat 22 yang berbunyi penanganan adalah suatu proses atau cara melakukan tindakan preventif, represif dan rehabilitatif terhadap gelandangan dan / dalam rangka memanusiaikan kembali gelandangan dan pengemis dan anak yang mempunyai masalah di jalan.

Hal ini, sesuai dengan hasil wawancara singkat dengan kepala seksi rehabilitasi tuna sosial korban tindak kekerasan dan perdagangan orang(H Agustian, AP., M. Si)

*“bawasanya di dalam pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis dinas sosial mengacu pada perda Nomor 12 tahun 2008 tentang kesejahteraan sosial.”*

Sedangkan, hasil dari wawancara bidang rehabilitas sosial(Drs.Bustami,MM).

*“sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban ini dinas sosial mengampu kebijakan peraturan daerah dari satpol pp ketika satpol pp merazia dari hasil tangkapan satpol pp akan di serahkan ke dinas sosial”*

Di dalam undang undang nomor 11 tahun 2009 yang menjadi acuan dinas yaitu dinas sosial di dalam pelaksanaan kedejahteraan sosial. Pada undang undang nomor 11 tahun 2009 pada pasal 24 ayat 1 yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab ; pemerintah dan pemerintahan daerah dan pada pasal 3 yaitu tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurup b di laksanakan: a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur; b.untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pada peraturan menteri sosial 08 tahun 2012 yaitu mengenai pedoman pendapatan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan

potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial. Dalam peraturan menteri sosial yang menyangkut tentang pendataan tentang PMKS, pada pasal 6 nomor 2 yaitu data PMKS yaitu sumber daya untuk mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan lembaga.

Dari hasil uraian diatas dapat diperkuat dari hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan yang digunakan di dalam pelaksanaan kebijakan dikategorikan baik, karena peraturan yang menjadi acuan dari dinas sosial kota pekanbaru sudah menjadi pedoman untuk melaksanakan program kebijakan dan didalam undang-undang kesejahteraan sosial nomor 11 tahun 2009, peraturan menteri sosial nomor 12 tahun 2008, dan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 sudah menyangkut semua kategori, penanganan, pendataan permasalahan penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan dan pengemis.

**a. Sumber Daya Dukungan ( Anggaran, Sumber Daya Manusia, Dan Fasilitas)**

Dalam Sumber daya dukungan ini yang di nilai dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan anggaran, sumberdaya manusia, dan sarana / prasarana. Sumber daya adalah unsur pelaksanaan yang juga merupakan peran yang sangat penting bagi pelaksanaan dalam suatu kebijakan. Oleh karena sebab itu dalam mengevaluasi kebijakan berupa program yang akan di nilai sangat penting untuk melihat sumber daya dukungan.

## **b. Sisi anggaran**

Dalam sisi anggaran yang berupa sejumlah uang yang di gunakan untuk priode tertentu dalam melaksanakan suatu program. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program, karena tanpa adanya anggaran yang memadai untuk melaksanakan suatu program tersebut akan sangat sulit dilaksanakan.

Dalam suatu anggaran yang di peroleh oleh dinas sosial kota pekanbaru di peroleh melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, akan tetapi anggaran tersebut tidak sepenuhnya untuk mengatsi masalah gelandangan dan pengemis secaca khusus, akan tetpi untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk di dalamnya untuk menangani gelandangan dan pengemis.

Dari hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Rehabilitas Sosial (Drs.Bustami,MM).

*“Untuk pengalokasian anggaran untuk gelandangan dan pengemis memang belum menjadi skala prioritas pada saat ini, karena anggaran untuk operasional sangat terbatas.”*

Sedang kan dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Orang(H Agustian, AP., M. Si).



*“Sebenarnya dalam permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan program pembinaan untuk penyandang masalah sosial yang menjadi permasalahan adalah anggaran untuk menangani gelandangan dan pengemis bahkan anggaran tersebut bukan hanya untuk gelandangan dan pengemis saja tapi melainkan untuk semua PMKS.”*

Maka dapat di simpulkan bahwa dari segi anggaran dalam penanganan gelandangan dan pengemis dikategorikan kurang, sehingga membuat pelaksanaan tersebut dalam penanganan gelandangan dan pengemis belum berjalan dengan maksimal.

### **c.Fasilitas**

Fasilitas adalah sarana atau prasarana untuk mempermudah berjalannya dalam sebuah program penanganan gelandangan dan pengemis. Karena fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan, jadi fasilitas merupakan unsur yang sangat penting karena tanpa adanya fasilitas yang memadai akan sangat susah berjalannya suatu program.

Maka dalam menjalankan suatu program pembinaan gelandangan dan pengemis, fasilitas merupakan suatu elemen yang sangat penting. Karena dalam menjalankan program pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru yang mana masih kurangnya sarana dan prasarana menyebabkan pembinaan dan pelatihan terhadap gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bidang Rehabilitas Sosial (Drs.Bustami,MM).

*“dalam fasilitas yang ada pada dinas sosial terutama fasilitas untuk melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis dan penyandang masalah lainnya sudah memadai tapi belum maksimal.kalau hannya untuk sekedar tempat penampungan sementara sudah cukup itu hanya untuk 3 samapi 7 hari saja.”*

dari hasil wawancara dengan pengemis ibu mita surya rosanti.

*“saya pernah di razia, dan di sana saya di bina dan di beri penyuluhan setelah itu di pulangkan”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dalam fasilitas dalam pelaksanaan program pembinaan sangat terbatas, dapat dilihat dari fasilitas untuk pembinaan untuk PMKS salahsatunya gelandangan dan pengemis, dinas sosial tidak mempunyai tempat penampungan akhir bagi gelandangan dan pengemis.

#### **d. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat di lepaskan dalam sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun perusahaan. Bahwasanya pada hakikatnya SDM berupa manusia yang di pekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

Di lihat dari ketersediaan sumber daya manusia sebagai unsur yang sangat penting. Maka dinas sosial kota pekanbaru di dalam program penyandang masalah sosial menyangkut gelandangan dan pengemis yaitu bidang rehabilitas sosial dan perlindungan anak di katagorikan baik karena mereka dalam jenjang pendidikannya rata-rata sarjana dan mereka juga sudah menjalani pelatihan di bidang sosial.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitas sosial (Drs.Bustami,MM).

*“Sumber daya manusia dari pelaksanaan dalam program pembinaan gelandangan dan pengemis, belum sepenuhnya maksimal,di karnakan keterbatasannya sumberdaya manusia,mereka tidak mempunya tempat penampungan akhir bagi gelandangan dan pengemis”*

Dapat disimpulkan bahwasanya,dalam sumber daya manusia di dinas sosial dalam penertiban program pelatihan dan pembinaan belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi wawancara ke dinas sosial bahwasanya dinas sosial kota pekanbaru belum mempunyai tempat penampungan akhir bagi gelandangan dan pengemis. Dinas sosial hanya mempunya tempat penampungan sementara, dalam penampungan sementara hanya dapat 3 sampai 7 hari saja.

Dari hasil dan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa sumber daya yang di sediakan di dalam pelaksanaan program pembinaan gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru dikatagorikan belum memadai terutama pada fasilitas, anggaran, dan juga sumber daya manusia yang masih katagorikan yang cukup.

### 5.2.2 Process

Proses yaitu dalam suatu kegiatan dalam upaya mengubah input dalam kondisi awal dan di harapkan akan mencapai kondisi yang di harapkan dalam tujuan program. Proses dari sebuah program yang menjadi sub indikator dari penilaian adalah implementasi program dalam pelaksanaan program pembinaan dan adanya keterlibatan kelompok masyarakat.

#### a. Implementasi program pelaksanaan program pembinaan

Dalam implementasi program merupakan pelaksanaan dari program yang yang di jalankan agar dari sebuah tujuan dari program tersebut tercapai. Oleh sebab itu perlunya melihat dari segi bagai mana program tersebut dilaksanakan, karna salah satu indicator dari proses yang akan dinilai dari sebuah evaluasi yaitu bagaimana dari pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Di dalam pelaksanaan kebijakan program tersebut, dinas social mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 yang menjadi acuan utama didalam penanganan masalah social salah satunya gelandangan dan pengemis. Penulis ingin melihat dampak dan manfaat dari sebuah pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh dinas social kota pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis sudah tertuang didalam program kegiatan pembinaan yang telah di tetapkan, di mana dinas social melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang bekerja sama dengan satpol PP. kemudian melakukan penertiban yaitu dengan merazia di setiap jalan umum

kota pekanbaru terutama di lampu merah dan di tempat umum lainnya. Kemudian hasil dari tangkapan satpol PP kota pekanbaru, gelandangan dan pengemis di serahkan kepada dinas social untuk melakukan tindak lanjut yaitu di beri penyuluhan dan di bina.

Upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu usaha preventif / menekan / meniadakan contohnya dengan sosialisasi yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk menghambat dan atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan social terutama masalah gelandangan dan pengemis.

Sedangkan usaha represif/ pencegahan contohnya penyuluhan, penertiban, dan koordinasi adalah usaha yang teroganisir dengan maksud meniadakan gelandangan dan pengemis serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

Seperti hasil wawancara yang di sampaikan oleh kepala bidang rehabilitas sosial (Drs.Bustami,MM).

*“Dinas social mempunyai suatu program kegiatan pembinaan gelandangan dan pengemis yang sudah tertuang dalam program kerja dinas sosial, untuk gelandangan dan pengemis akan di lakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis setelah itu kita akan mendata gelandangan dan pengemis tersebut. apabila gelandangan dan pengemis tersebut dari kota pekanbaru mereka akan di bina dan apabila gelandangan dan pengemis tersebut di luar kota pekanbaru mereka akan di pulangkan dan di beri angkos untuk pemulangan mereka ke kabupaten atau provinsi mereka masing-masing.”*

Sedangkan hasil dari wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Orang(H Agustian, AP., M. Si).

*“Dalam pelaksanaan program untuk gelandangan dan pengemis kita melakukan razia yang bekerja sama dengan satpol pp untuk melakukan penertiban dengan merazia gelandangan dan pengemis. Setelah itu hasil dari tangkapan satpol pp di serahkan ke dinas social untuk melakukan yaitu pembinaan dan di beri penyuluhan dan pelatihan terhadap gelandangan dan pengemis.”*

Untuk memperkuat informasi penulis melakukan wawancara dengan Jeli Windra yaitu salah satu dari anggota satpol pp kota pekanbaru.

*“mereka yang terjaring razia oleh satpol pp akan di serahkan ke dinas sosial karna kita hannya melakukan penertiban yaitu merazia. Setelah di serahkan ke dinas sosial mereka akan dibina dan di beri pelatihan oleh dinas sosial. Tapi walau pun berkali2 di razia tetap saja meraka kembali ke jalan.”*

Dilihat dari hasil kutipan wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwasanya dinas sosial dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis hanya memberikan pembinaan dasar terhadap gelandangan dan pengemis. Dinas sosial juga melakukan pendataan untuk melakukan pendataan, dimana saja gelandangan dan pengemis di luar kota pekanbaru akan di kembalikan ke daerah asalnya masing-masing dan gelandangan dan pengemis yang berdomisili di kota pekanbaru akan dilakukan pembinaan dasar sesuai dengan program-program yang telah ada.

Dari hasil penelitian ini penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu petugas satpol pp kota pekanbaru dan hasil dari pertanyaannya mereka yang terjaring razia oleh satpol pp akan di serahkan ke dinas sosial karna kami hanya melakukan penertiban yaitu merazia. Setelah di serahkan ke dinas sosial mereka akan dibina dan di beri pelatihan oleh dinas sosial. Tapi walau pun berkali2 di razia tetap saja mereka kembali ke jalan.pendapat penulis apa bila gelandangan dan pengemis hanya di lakukan pembinaan dasar, hal tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan menyadar kan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru,kemungkinan mereka akan turun kejalan lagi karna sudah terbiasa dengan meminta-minta dengan belaskasih orang.

Menurut data yang di peroleh oleh penulis bahwasanya, pada tahun 2015 dinas sosial mempunyai program pembinaan keterampilan skil seperti perbengkelan,stir,otomotif,salon, dan lain sebagainya terhadap gelandangan dan pengemis.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitas sosial (Drs.Bustami,MM).

*“mereka sudah dibina dan di kasi pencerahan di kasi pencerahan seharusnya masuk telinga kiri keluar telinga kanan.ini malah sebaliknya mereka di kasi pencerahan tidak masuk,malah mantul.contohnya sore sabtu mereka di beri pencerahan pagi minggu sudah muncul kejalan lagi, mereka di kasi keterampilan menjahit, perbengkelan,pangkas rambut mereka tidak mau malah senang mengemis karna sudah kebiasaan mereka.”*

Hasil wawancara dengan pengemis ibu masnawati.

*“ ya saya lebih seneng mengemis karna dari hasil mengemis dapat memenuhi kebutuhan”*

Dari kesimpulan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya, program pembinaan keterampilan skil terhadap gelandangan dan pengemis tidak berjalan dengan sepenuhnya, dikarenakan dinas sosial hanya melakukan program pembinaan dasar terhadap gelandangan. tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh oleh dinas sosial kota pekanbaru.

Dalam pelaksanaan program untuk mengatasi masalah sosial gelandangan dan pengemis, dinas sosial tidak sepenuhnya melaksanakan program pembinaan tersebut berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang di temui saat pelaksanaan program tersebut. hal ini masih terlihat bahwasanya masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di jalan kota pekanbaru.

Seperti hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan bidang rehabilitas sosial (Drs.Bustami,MM).

*“untuk hambatan nya mereka yang susah untuk mengubah dan menginset otaknya itu untuk mengubahnya tidak sebentar harus butuh waktu, jadi mereka di kasi pencerah padahal dinas sosial sudah menggunakan psikolog atau ahli jiwa tidak bisa nangkap juga.*

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Orang(H Agustian, AP., M. Si).



*“terkadang gelandangan dan pengemis yang kita bina dan di beri pencerah terhadap mereka agar mereka tidak turun kejalan lagi malah sebaliknya mereka ini sudah di kasi keterampilan tidak di gunakan malah lebih seneng turun kejalan lagi untuk melakukan kebiasaan mereka.”*

Hal ini juga di ungkapkan oleh pengemis yang telah di bina oleh dinas sosial akan tetapi kembali ke jalan yang bernama suryani, umur 45 tahun.

*“pernah di razia, di suruh untuk tidak turun ke jalan lagi, saya kembali kejalan lagi untuk kebutuhan saya.”*

dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pengemis tersebut, di mana pengemis tersebut sudah pernah di lakukan razia akan tetapi dari hasil razia yang di lakukan oleh dinas sosial maupun tim gabungan salahsatunya satpol pp tidak memberikan efek dari razia maupun pembinaan yang di lakukan oleh dinas sosial terhadap gelandangan dan pengemis tersebut. hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis dari hasil wawancara yang dilakukan rata-rata mereka kembali lagi kejalan untuk mencari nafkah karna sudah menjadi kebiasaan mereka.

#### **b. Adanya Keterlibatan Kelompok Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat ataupun organisasi masyarakat yang ikut berpartisipasiikut serta dalam membantu masalah sosial salah satunya gelandangan dan pengemis akan memberikan dampak yang bagus dalam pengurangan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru yang bekerja di jalan. Setidaknya dengan keterlibatan masyarakat yang mana mau ikut serta dalam penanganan

gelandangan dan pengemis bukan hanya saja membantu dinas sosial akan tetapi dari segi pemikiran gelandangan dan pengemis tersebut akan merasakan adanya kepedulian masyarakat terhadap mereka yang selama ini.

Dari hasil wawancara terhadap bidang rehabilitas sosial (Drs.Bustami,MM).

*“untuk sampai saat ini peran masyarakat ada minimal mereka Cuma melaporkan contohnya semalam katakanlah terlantar dia di rumah langsung turun RT/RW dengan masyarakat mengadu ke dinas sosial.”*

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dalam mengenai keterlibatan masyarakat yaitu bahwasanya adanya keikutsertaan masyarakat dalam membantu dinas sosial agar dapat mengurangi masalah sosial di kota pekanbaru.

### **5.2.3 Output (Keluaran)**

Pada tahapan output, evaluasi evaluasi di gunakan untuk melihat bagaimana keluaran atau hasil dari pelaksanaan program itu sendiri, untuk kemudian di analisis sejauh mana hasil tadi dapat di rasakan oleh penerimaan program. Untuk melihat output atau keluaran ini, ada dua sub indikator yang akan di nilai yaitu:

- a. Efektivitas dari hasil terlaksananya program
- b. Efisiensi dari hasil terlaksananya program

### a. Efektivitas Program

Efektivitas dalam sebuah kebijakan adalah berkenaan dengan apakah hasil yang di inginkan dari sebuah kebijakan telah dicapai. Atau dengan kata lain apabila suatu kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah agar tepat pada sasaran dan tujuan yang di inginkan. Adapun keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepala publik. Agar masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat dapat di atasi dengan baik.

Efektivitas salah satu bentuk di mana suatu organisasi melangkah dengan tujuan-tujuan yang ingin di capai semakin besar maka akan semakin besar juga efektivitasnya. Adapun menurut kumorotomo dalam pasolong, (2010:180) efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

Dalam program pembinaan yang telah dilakukan dinas sosial terhadap gelandangan dan pengemis dapat di katakan kurang efektif karena kegiatan program yang di tetapkan oleh dinas sosial belum sepenuhnya atau berjalan dengan sepenuhnya, karna masih adanya hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan di dalam pelaksanaan kegiatan program tersebut dalam hal ini dapat di lihat masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota pekanbaru dalam hal ini juga telah di katakan oleh bapak Drs.Bustami,MM selaku bidang rehabilitas sosial

*“belum sepenuhnya efektif karna yang banyak itu mereka bukan warga kota pekanbaru orang menyangka itu orang warga kota pekanbaru mereka hanya mangkal datanya data kampung karna itu mereka tidak bisa kita bina dan di beri pelatihan dan ketika kita kembalikan di bus sampai di rumah makan kembali lagi mereka ke kota pekanbaru jadi orangnya itu2 aja.”*

Sedangkan pendapat dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Orang(H Agustian, AP., M. Si).

*“dari pelaksanaan program ini mungkin sudah efektif tapi belum sepenuhnya karna permasalahannya gelandangan dan pengemis yang kami tangkap dan di beri pencerahan terhadap mereka sesudah di kembalikan mereka akan turun ke jalan lagi karna sudah kebiasaan mereka.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam program tersebut kurang efektif karna dalam sejauh ini, dalam melakukan razia dan pembinaan yang di lakukan belum di rasakan lagi dari hasilnya di tambah lagi dengan pola pikir mereka yaitu gelandangan dan pengemis yang menjadi kewajiban mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membantu perekonomian keluarga yang menjadi salah satu faktor utama mereka untuk turun kejalan.

## **B.Efisiensi Dari Pelaksanaan Program Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis**

Di lihat dari efisiensi dalam sebuah kebijakan melihat beberapa sumber daya yang di gunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Dalam hal ini untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang di perlukan untuk mencapai hasil yang di ingin kan dalam suatu kebijakan. Jadi dapat disimpulkan yang di maksud efisiensi adalah jumlah yang di perlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang di kehendaki.

Efisiensi menunjukkan bagaimana pencapaiannya, yakni di bandingkan dengan usaha,biaya atau suatu pengorbanan yang harus dikeluarkan.dalam pernyataan dari hasil wawancara dengan bapak bidang rehabilitas sosial (Drs.Bustami,MM).

*“sudah efisien tapi belum sepenuhnya,karna dari sumberdaya yang di keluarkan untuk gelandangan dan pengemis itu belum sepenuhnya terlaksanakan secara efektif.”*

Dari hasil kesimpulan yang di ambil oleh penulis bahwa program tersebut belum sepenuhnya efisiensi karena sumber daya yang telah digunakan di dalam kebijakan program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan lancar program pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dan adanya hambatan-hambatan di dalam pencapaian dari program kebijakan dinas sosial dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru.

#### 5.2.4 Outcome (Manfaat)

Pada tahapan outcome, evaluasi di gunakan untuk melihat bagai mana dampak atau nilai positif dan negatif dari sebuah program. Pada tahapan outcome ini akan melihat dampak apa sajakah yang di rasakan oleh gelandangan dan pengemis dari penerima program setelah melihat dari hasil pelaksanaan program itu sendiri. Untuk indikator outcome atau manfaat yang ada pada gelandangan dan pengemis yaitu indikator yang akan di nilai yaitu dampak dari pelaksanaan pembinaan program terhadap gelandangan dan pengemis.

##### **a. Dampak dari pelaksanaan program pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis**

Dengan adanya program pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial, diharapkan akan memberikan dampak terhadap yang menerima program pembinaan yaitu gelandangan dan pengemis. Program yang diberikan oleh dinas sosial diharapkan agar dapat mengurangi masalah sosial yang ada dikota pekanbaru, akan tetapi sehubungan dengan indikator dampak yang dinilai oleh penulis bahwasanya dampak pembinaan yang diberikan oleh dinas sosial terhadap gelandangan dan pengemis, belum memberikan dampak yang maksimal.

Dalam program yang dilaksanakan oleh dinas sosial melalui program pembinaan di harapkan agar gelandangan dan pengemis tersebut dapat kembali ke status sosialnya dan mereka tidak turun ke jalan lagi. Namun dilihat dari segi pelaksanaan program yang kurang maksimal karena adanya kendala-kendala yang ditemui oleh dinas sosial dan hasil yang dicapai kurang efektif.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Drs.Bustami,MM selaku bidang rehabilitas sosial.

*“kendala yang kita hadapi itu menginset dari pola pikir mereka itu lama dan butuh waktu yang cukup lama, karna dalam pembinaan ini kita sudah memberi pencerahan pun tidak masuk,makanya itu mereka itu lebih seneng turun kejalan karna sudah kebiasaan mereka.”*

Hasil wawancara dengan gelandangan Burhanudin.

*“ya saya sudah lama kayak ini karna faktor ekonomi”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwasanya dinas sosial belum dapat mengurangi gelandangan dan pengemis karena adanya kendala yang di temui, dan pembinaan yang mereka lakukan terhadap gelandangan dan pengemis tidak seluruhnya di karenakan pola pikir dari gelandangan dan pengemis tersebut,oleh karna itu gelandangan dan pengemis yang telah di bina oleh dinas sosial rata-rata akan kembali ke jalan lagi dan belum memberikan efek positif terhadap gelandangan dan pengemis tersebut.

### **5.3 Analisis Hasil/ Pembahasan Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Gelandangan Dan Pengemis Dikota Pekanbaru.**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh dinas sosial dan gelandangan dan pengemis melalui obsevasi dan wawancara mengenai ecaluasi kebijakan dinas sosial kota pekanbaru dalam mengatasi galandangan dan

pengemis di kota pekanbaru yang dimana telah penulis bahas perindikator, yaitu sebagai berikut:

1. Imput (masukan) merupakan suatu objek untuk dikembangkan oleh kebijakan program atau sesuatu yang diproses di dalam program, dapat juga di persepsi sebagai bahan yang dimasukan dari sesuatu untuk suatu proses. Menurut pendapat penulis, melalui analisis yang telah dilakukan mengenai evaluasi kebijakan dinas sosial kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis yaitu salah satu indikator penilaiannya adalah imput (masukan) yang menjadi masukan untuk sebuah pelaksanaan program pembinaan gelandangan dan pengemis dapat di simpulkan bahwa belum terlaksanakan dengan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari sub indikator yang di nilai dari indikator imput (masukan) yaitu salah satunya sumber daya dukungan yang masih kurang baik karena masih adanya kekurangan yang di temukan seperti anggaran, fasilitas, dan termasuk juga sumber daya manusia yang belum terpenuhi secara maksimal. menurut pendapat penulis apa bila imput belum terlaksanakan dengan baik akan mempengaruhi dari proses pelaksanaan sebuah program yang dilaksanakan.

2. Process, adalah suatu kegiatan yang menunjukkan suatu upaya untuk mengubah imput dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program. Analisis yang telah dilakukan oleh penulis melalui pengamatan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Bahwasanya indikator yang menjadi penilaian yaitu salahsatunya proses dari pelaksanaan kebijakan dinas sosial dalam penanganan masalah sosial salah satunya gelandangan dan pengemis belum terlaksanakan dengan maksimal. proses yang



dimaksudkan yaitu bagaimana pelaksanaan dari program kebijakan tersebut dilaksanakan. Menurut penulis, dalam proses pelaksanaan dari kebijakan dinas sosial kota pekanbaru dalam penanganan gelandangan dan pengemis cukup berjalan dengan baik dikarenakan dari pelaksanaan program yang di tetapkan oleh dinas sosial telah dilaksanakan walau pun kurang berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang terlihat dikota pekanbaru dan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap dinas sosial kota pekanbaru, bahwasanya program pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap gelandangan dan pengemis hanya dilakukan pembinaan dasar yang menurut penulis , di mana pembinaan dasar tidak akan membuat gelandangan dan pengemis tersebut kembali kepada fungsi sosialnya dan akan membuat gelandangan dan pengemis tersebut turun kembali kejalan lagi. Hal ini terbukti bahwasanya dari hasil di lapangan, di mana rata-rata gelandangan dan pengemis yang telah di wawancarai oleh penulis mereka dirazia oleh dinas sosial maupun satpol pp.

3. Output, merupakan dari keluaran atau hasil dari program yang telah berjalan, apakah program tersebut sudah terlaksanakan dengan menghasilkan tujuan yang ingin di capai. Output merupakan salah satu indikator dari suatu penilaian dari penulis di dalam evaluasi kebijakan dinas sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Dalam analisis yang dilakukan penulis, bahwasanya dari hasil kebijakan program yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial belum tercapai dengan efektif dan efisien. Terlihat dari pelaksanaan program pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis belum memberikan hasil yang

maksimal dikarenakan masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang bekerja di jalan dan juga jumlah gelandangan dan pengemis semakin bertambah, terlihat dari banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dikota pekanbaru.

4. Outcame dapat diartikan dengan manfaat, dengan melihat dari dampak yang di terima dari penerima program tersebut. analisis yang dilakukan oleh penulis, outcame dari program pembinaan dari program pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap gelandangan dan pengemis, belum memberikan dampak signifikan terhadap gelandangan dan pengemis. Terlihat dari program pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial kota pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis belum memberikan dampak dan manfaat terhadap gelandangan dan pengemis.dari pengamatan oleh penulis, melalui wawancara terhadap gelandangan dan pengemis yang telah dibina oleh dinas sosial rata-rata tidak adanya manfaat yang mereka dapat dari pembinaan tersebut.

#### **5.4 kendala yang dihadapi oleh dinas sosial kota pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru**

Kebijakan adalah suatu ketetapan untuk memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun kebijakan dibuat oleh orang yang memiliki wewenang dalam negara serta diciptakan untuk mengatur segi kehidupan manusia berdasarkan kebutuhan dan masalah yang di hadapi didalam sebuah masyarakat itu sendiri.

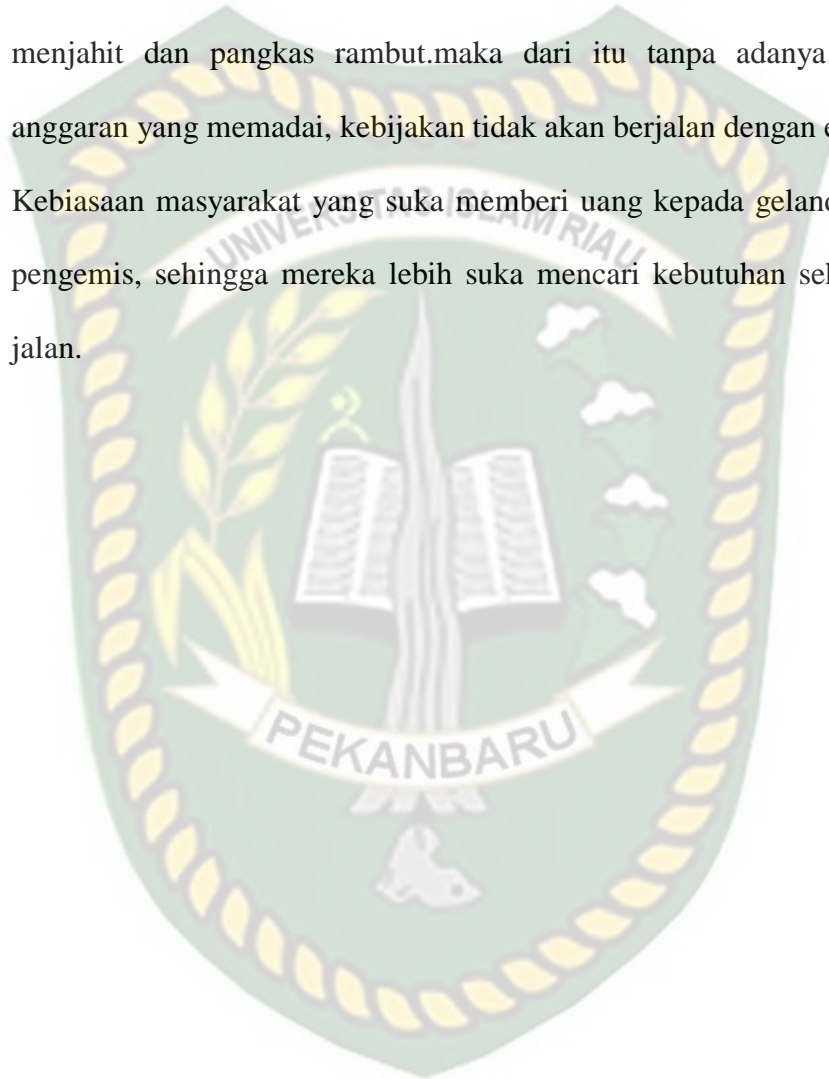
Masalah sosial gelandangan dan pengemis kota pekanbaru adalah masalah yang sampai sekarang ini belum dapat diatasi, dari hasil di lapangan di perkirakan gelandangan dan pengemis yang bekerja di jalan kota pekanbaru di perkirakan semakin bertambah hal ini terlihat dari banyaknya gelandangan dan pengemis baik itu anak jalan, pengamen, mengelap kaca mobil dan lainnya. Untuk itu pemerintah daerah kota pekanbaru melalui dinas sosial kota pekanbaru membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sosial gelandangan dan pengemis melalui program-program yang telah ditetapkan, namun didalam pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan dengan maksimal hal ini terlihat dari penilaian yang telah dilakukan oleh penulis dan dapat terlihat masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang bekerja di jalan.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala yaitu:

1. Dalam fasilitas pendukung dalam pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis belum sepenuhnya maksimal dikarenakan mereka tidak mempunyai tempat penampungan akhir untuk gelandangan dan pengemis.
2. Dalam kelompok sasaran yang menerima pembinaan program tersebut dalam memberikan pembinaan dan pencerahan terhadap gelandangan dan pengemis tersebut untuk menginsyet pola pikir mereka sangat sulit.karna untuk menginsyet untuk mengubah pola pikir mereka butuh waktu yang cukup lama.
3. Dalam pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial agar mereka tidak turun kejalan lagi belum maksimal.walau pun mereka sudah di bekal

dengan keterampilan khusus seperti menjahit, pangkas rambut, bengkel dan lainnya mereka lebih memilih untuk turun kejalan lagi karna bagi mereka untuk semua itu tentu membutuhkan modal untuk membuka usaha seperti menjahit dan pangkas rambut.maka dari itu tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

4. Kebiasaan masyarakat yang suka memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, sehingga mereka lebih suka mencari kebutuhan sehari-hari di jalan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru yang berpedoman pada teori evaluasi yaitu input (masukan), process (proses), output (keluaran), outcome (manfaat). Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang ditemui dalam penelitian seperti telah di bahas dalam bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pelaksanaan dinas sosial dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal dalam upaya penanganan masalah gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru dikarenakan untuk mengubah pola pikir mereka tidak mudah, membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena gelandangan dan pengemis tersebut saat dilakukan pembinaan atau pun pencerahan terhadap mereka, mereka tidak bisa merekam atau menginsyet pada saat memberikan pencerahan terhadap mereka yang di lakukan oleh dinas sosial, menurut penulis dalam hal ini tidak akan memberikan dampak terhadap gelandangan dan pengemis bukan malah mengurangi mereka malah semakin bertambah.
2. Kendala yang di hadapi oleh dinas sosial yaitu tidak adanya tempat penampungan akhir bagi gelandangan dan pengemis, dan untuk

mengubah pola pikir gelandangan dan pengemis tersebut yang susah untuk diatur sehingga mereka tertarik untuk kembali kejalan lagi.

## 1.2 Saran

1. disarankan untuk pemerintahan kota pekanbaru, supaya lebih peduli lagi terhadap masalah gelandangan dan pengemis, dengan memberikan anggaran khusus terhadap gelandangan dan pengemis agar dalam pengoperasian tersebut dapat berjalan dengan maksimal, dengan memberikan anggaran yang cukup karna anggaran tersebut buakan hanya untuk gelandang dan pengemis melainkan untuk PMKS lainnya.
2. dalam melakukan pelatihan berupa keterampilan seharusnya dinas sosial kota pekanbaru dapat melakukan lebih dari sekali setahun agar gelandangan dan pengemis lebih ahli dan bisa dikembangkan dan dalam melakukan pelatihan lebih banyak lagi jangan hanya sebagian gelandangan dan pengemis saja.
3. dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru di harapkan adanya kerja sama dengan masyarakat agar dapat membantu dinas sosial dalam mengatasi masalah sosial gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru.
4. adanya dukungan dan kerja sama antara semua pihak dan masyarakat agar tidak memberikan sumbangan di jalan dalam bentuk apapun.
5. penulis berharap dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru agar berjalannya suatu upaya untuk mengurangi berkembangnya

gelandangan dan pengemis agar adanya tempat penampungan akhir bagi gelandangan dan pengemis.

6. saya berharap, bagi kelompok penerima program yaitu gelandangan dan pengemis mau mengubah pola pikir dan mau dibina.
7. diharapkan kepada implementator agar lebih meningkatkan kinerja dari pelaksanaan kebijakan, supaya program dalam menangani gelandangan dan pengemis dapat berjalan dengan maksimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017 *Dasar-Dasar Kebijakan Public* (Edisi Revisi) Alfabeta, Bandung .
- Abidin, 2002. *Kewenangan pemerintah*. Jakarta, ghalia indonesia
- Dharma Setiawan, Salam. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*: Jakarta. Djembatan.
- Drs. Syaukani, Dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet III, 2003
- Dunn, William, N. 2003 *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ditsman. 2011. *Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dengan Satpol PP Dikota Pekanbaru*. <http://www.jurnalskripsiUR.pdf>. di akses 30 january 2013.
- Edward III, George. 2003. *Implementasi Kebijakan Public*. Yayasan pembaharuan Administrasi Public Indonesia. Indonesia, Yogyakarta.
- Iqbali, Saptono. 2005. *Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kubu Kecamatan Karangasem*. <http://www.jurnalskripsiUNUD.pdf>. diakses 2 februari 2013.



Kansil C.S T Dan Kristine, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:

Bumi Aksara.

Koryati, nyimas Dwi, dkk, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah Yogyakarta*, YPAPI

Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Public*. Bandung: Mandar Maju,

Labolo, Muhadam. 2011. *Kepemimpinan Bahari: Sebuah Alternative*

*Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Malang.

Munaf, Yustri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan

7 Publishing.

Muryani, Tri. 2008. *Rehabilitasi bagi gelandangan dip anti rehabilitasi sosial*

*bina karya sidomulyo Yogyakarta*. <http://www.jurnal skripsi sunan kalijaga.pdf>. di akses 230 januari 2013.

Nugroho Dwidjowijoto. 2008. *Manajemen pemberdayaan*. Sebuah pengantar

Dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat. Elex media komputindo.

Jakarta.

Nugroho 2003, *Kebijakan Public Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*.

Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekonstruksi Ilmu*

*Pemerintahan*. Jakarta: rineka cipta.

Nurcholis, hanif, 2005 *teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah*.PT.

Gramedia, jakarta.

Rasyid, Ryass. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan

Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Cv.Indra Prahasta.

Suharto, 2010. Analisis kebijakan public, panduan mengkaji masalah dan

Kebijakan sosial. Bandung: CV. Alfabeta.

Syafie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika

Aditama.

Syafie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika

Aditama

Syafie, Inu Kencana. 2005. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju,

Tangkilas, Hassel, 2003. *Implementasi Kebijakan Public*. Yogyakarta: Lukman

Offset.

Dokumentasi:

Undang-Undang No 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 255 Ayat 1 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP.

Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Larangan.

Peraturan Walikota Pekanbaru No.97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

